

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Istilah Politik Luar Negeri (PLN) tidak sulit untuk didefinisikan. Secara sederhana ini adalah suatu bentuk kebijaksanaan atau tindakan yang diambil dalam hubungan dengan situasi atau aktor yang ada di luar batas wilayah negara. Dengan demikian politik luar negeri Indonesia adalah tindakan yang dilakukan Indonesia berkenaan dengan situasi atau aktor di luar batas wilayahnya.¹

Pada penelitian ini, penulis membahas isu ekonomi politik internasional (EPI) yang dalam beberapa dekade belakangan telah menjadi isu menarik di luar isu-isu seperti keamanan dan lingkungan global. Bahasan tentang isu ekonomi politik internasional secara khusus mengkaji tentang **“Strategi Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Perdagangan Bebas Dengan Jepang dan China”**. Perumusan kebijakan politik luar negeri suatu negara terutama Indonesia tidak terlepas dari keterkaitan isu ekonomi dan politik domestik ataupun pengaruh lingkungan global. Sedangkan ekonomi dan politik dalam konteks kebijakan luar negeri ibarat dua sisi mata uang logam, keduanya saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Untuk selanjutnya istilah ekonomi dalam tulisan ini secara langsung mengikat istilah politik.

¹Mas'oed, Mohtar. *Studi Hubungan Internasional : Tingkat Analisis dan Teorisasi*, (Yogyakarta:

Lebih jauh Gilpin dalam buku *The Political Economy of International Relations*: 1987 mengatakan, bahwa regulasi dan aturan politik menyatakan kerangka kerja yang dengannya pasar berfungsi. Pada saat bersamaan, kekuatan ekonomi merupakan basis bagi kekuatan politik. Jika ekonomi adalah tentang pencapaian kekayaan dan politik adalah tentang pencapaian kekuatan, keduanya berinteraksi dengan cara yang rumit dan memusingkan. Hal ini merupakan hubungan yang kompleks dalam konteks internasional antara politik dan ekonomi, antara negara dan pasar.²

Integrasi ekonomi global ditopang oleh semakin rendahnya biaya transportasi dan hambatan-hambatan perdagangan. Kedua faktor ini telah menciptakan pasar-pasar dunia yang lebih terbuka (Perraton, at. al., 2000: 289). Globalisasi ekonomi dan pergeseran paradigma pembangunan dari *state-led development* (pembangunan yang dipimpin negara) ke arah *market-driven development* (pembangunan yang digerakan pasar), yang mulai mengemuka sejak era tahun 1980-an, telah mempunyai implikasi serius terhadap peran negara dalam pembangunan.³

Dalam beberapa tahun terakhir memasuki abad 21, perkembangan yang pesat dalam perekonomian dan perdagangan di kalangan negara Asia Pasifik semakin memperkuat pandangan bahwa abad ke-20, yang dikenal sebagai abad Atlantik akan segera digantikan oleh abad 21 sebagai abad Pasifik.

²Jackson, Robert & Sorensen Georg, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, terj: Dadan Suryadipura, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cetakan II Januari 2009),. Hlm. 228.

Petunjuk kearah itu semakin nyata, sejalan dengan volume perdagangan di kalangan negara Asia Pasifik yang volumenya kini bukan hanya telah mencapai setengah volume perdagangan global, tetapi bahkan telah melampaui volume perdagangan trans-Atlantik.⁴

Atas alasan inilah, tulisan ini membahas tentang fenomena ekonomi politik negara-negara di kawasan Asia Pasifik terutama dalam kerjasama ekonomi dan perdagangan bebas antara Indonesia dengan Jepang dan ASEAN⁵ (Indonesia) dengan China. Diantara kedua negara lainnya, Indonesia masih berstatus sebagai negara berkembang (NB). Oleh karena itu, Indonesia perlu menjalin kerjasama dengan negara-negara maju seperti Jepang dan China, daripada hanya sekedar menyaksikan perkembangan pembangunan dunia, agar bisa naik kelas sebagaimana dalam teori sistem dunia Wallerstein⁶. Sedikitnya ada empat alasan lain pada tema EPI (kemitraan ekonomi dan perdagangan bebas) seperti tersebut di atas, sehingga pembahasan ini menjadi menarik dan penting untuk diteliti. *Pertama*, penulis memfokuskan bahasan pada Strategi Politik Luar Negeri (PLN) Indonesia terhadap hubungan kerjasama ekonomi dan perdagangan bebas dengan Jepang dan China,

⁴*Ibid.*, Hlm., 18.

⁵ Untuk selanjutnya, dalam tulisan ini istilah ASEAN langsung merujuk kepada Indonesia.

⁶ Teori Sistem Dunia adalah kritik Immanuel Walerstein atas teori modernisasi dan dependensi yang tidak bisa menjelaskan pembangunan di dunia ketiga, yang bisa dijelaskan hanya gejala terjadinya keterbelakangan. Teori ini menganggap sistem dunia kapitalis telah menyebabkan disparitas negara-negara dunia semakin nyata, yaitu antara negara *core* atau pusat, *semi-periphery* atau setengah pinggiran, dan negara *periphery* atau pinggiran. Penekanan pada teori ini adalah, Negara-negara di dunia bisa naik dan juga bisa turun kelas. Adapun strategi proses kenaikan kelas seperti: Merebut kesempatan yang datang, Melalui undangan (keikutsertaan dalam saham *Multi National Cooperation*), Memandirikan negara sendiri. Lihat *Power Point* kuliah Teori

didorong oleh rasa nasionalisme penulis, yang selalu berharap perubahan signifikan di dalam pemerintahan Indonesia, dan pemilihan topik ini adalah sebagai usaha untuk merealisasikan harapan tersebut. *Kedua*, untuk mengeksplorasi posisi dan potensi Indonesia terhadap pelaksanaan kerjasama ekonomi dan perdagangan bebas dengan Jepang dan China. *Ketiga*, untuk mengidentifikasi strategi politik luar negeri Indonesia terhadap pelaksanaan kerjasama ekonomi dan perdagangan bebas dengan Jepang dan China, dengan melihat prospek internal Indonesia (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman) dari masing-masing forum kemitraan ekonomi dan perdagangan bebas tersebut. Terakhir, terdapat interdependensi dalam hubungan ekonomi dan perdagangan internasional tersebut.

B. Latarbelakang Masalah

Dewasa ini, isu ekonomi politik internasional (EPI) telah menjadi kajian favorit dan penting bagi para akademisi Hubungan Internasional. Terutama setelah berakhirnya perang dingin dan menyusul kemudiambruknya Uni Soviet, yang menyebabkan isu keamanan dan lingkungan global cenderung menyurut pada level terendah digantikan oleh dominasi isu ekonomi. Isu ekonomi ini berkisar pada munculnya blok-blok ekonomi dan perdagangan bebas, seperti : Amerika Utara, Eropa Barat, dan Asia Timur plus Jepang sebagai pimpinannya (*Triad Regions*). Selain itu *Free Trade Area* (FTA) dan *Economic Partnership Agreement* (EPA) dalam skop bilateral, regional

Liberalisme ekonomi yang diimplementasikan dalam bentuk kerjasama ekonomi dan perdagangan bebas baik dalam kerangka bilateral, regional, maupun multilateral dengan negara maju, telah menjadi formula baru bagi negara berkembang (NB) dalam upaya memperbesar volume perdagangan dan meningkatkan kapasitas perekonomian.⁷ Namun hal yang tidak boleh diabaikan sejalan dengan kecenderungan itu, bahwa di dalam proses globalisasi yang berlangsung memasuki abad 21 dan di dalam suatu sistem ekonomi politik internasional yang didominasi oleh negara-negara industri maju, disparitas kekuasaan (*power*) dan kekayaan (*wealth*) antara negara-negara berkembang yang miskin (dinamakan kelompok Selatan), dan negara-negara industri maju dan kaya (dinamakan kelompok Utara) semakin meningkat pula. Secara umum dapat dikatakan bahwa penyebab pokok masalah ini adalah sangat lambanya proses perubahan dan proses pembangunan (*change and development*) dibanyak negara berkembang, atau tersendat-sedatnya pembaruan sistem ekonomi politik internasional.⁸

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang (NB) dan juga menjadi salah satu anggota ASEAN yang sangat aktif melakukan kerjasama ekonomi. Tidak hanya dalam forum ekonomi multilateral seperti WTO, tetapi dalam berbagai kerjasama bilateral maupun regional *Free Trade Agreement* (FTA). Sejak krisis 1997/98, semakin banyak kesepakatan ekonomi yang diikuti oleh Indonesia dalam kerangka FTA regional, seperti ASEAN-China, ASEAN-Eropa, ASEAN-Australia-New Zealand, ASEAN-India, dll., maupun

⁷ *Op Cit., Pengantar Studi.*, Hlm 227-228. (Diolah).

⁸ *Op Cit., Globalisasi Peluang.*, Hlm., 11-12.

kerjasama dalam bingkai bilateral seperti *Economic Partnership Agreement* (EPA) dengan Jepang, Amerika, Rusia, dll. Agresifitas dalam kerjasama ekonomi FTA atau EPA akan menjadi sangat berbahaya bila langkah-langkah liberalisasi ekonomi tersebut tidak didahului dengan penyusunan strategi pembangunan industri dan perdagangan yang jelas. Karena strategi inilah yang bisa menjadi pedoman bagi pengembangan industri nasional.⁹

Lebih jauh penulis ingin menjelaskan posisi dan potensi dari masing-masing hubungan antar negara-negara kawasan Asia Pasifik, terutama hubungan Indonesia dengan Jepang dan China dalam merespon globalisasi ekonomi yang diwujudkan melalui kerjasama ekonomi dan perdagangan bebas (FTA dan EPA).

Selama lima dekade terakhir, Indonesia dan Jepang telah menjalin hubungan diplomatik terutama dalam bidang ekonomi. Sejak menandatangani perjanjian perdamaian pada tanggal 20 Januari 1958 di Jakarta, kedua negara mengawali hubungan ekonomi dengan kesepakatan damai pembayaran ganti rugi akibat perang. Sejak saat itulah, hubungan kerjasama Indonesia dengan Jepang di bidang ekonomi berangsur membaik dan cenderung terbuka. Perkembangan terakhir dari hubungan kerjasama Indonesia dengan Jepang di bidang ekonomi yaitu, kedua negara sepakat membentuk hubungan kerjasama ekonomi dan perdagangan bebas yang paling komprehensif atau biasa dikenal dengan istilah EPA (*Economic Partnership Agreement* atau kerjasama

9. Menurut penulis, salah satu alasan utama dari kesepakatan EPA adalah untuk

membentuk sekaligus memperlancar perdagangan, investasi, dan kepentingan strategis lain secara cepat karena hal tersebut tidak terbatas pada kedekatan geografis.

Pembentukan hubungan kerjasama EPA tersebut memiliki interdependensi terhadap satu sama lain. Bagi Indonesia, Jepang adalah mitra ekspor-impor terbesar sekaligus sebagai negara dengan investasi yang cukup tinggi di Indonesia, dan Indonesia telah merasakan surplus yang besar dalam hubungan perdagangannya dengan Jepang sehingga sayang untuk dilewatkan. Sementara bagi Jepang, Indonesia merupakan pasar yang sangat penting, meskipun telah mengalami penurunan dibanding dekade lalu, bagi Jepang Indonesia masih termasuk importir terbesar ke-6 (4,3%), setelah China, AS, Arab Saudi, Australia dan UEA. Sementara dari sisi impor, Indonesia juga merupakan negara mitra penting karena Indonesia merupakan pemasok utama industri manufaktur Jepang baik untuk komoditas energi, bahan baku dan bahan mentah. Selama ini, Jepang menggantungkan pasokan energinya dari Indonesia dengan total 24% dari keseluruhan kebutuhan gas Jepang.

Sedangkan, hubungan perdagangan China dan negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia telah terjalin sejak abad ketiga sebelum Masehi, yakni dengan adanya "jalur sutra" yang menghubungkan Asia Tenggara dan garis pantai tenggara China. Perdagangan ini kemudian berlanjut sampai masa modern. Setelah *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) berdiri tahun 1967, hubungan antara China dan negara-negara Asia Tenggara

negara di Asia Pasifik terutama dalam bidang ekonomi yang diimplementasikan melalui kerangka FTA (*Free Trade Area* atau kawasan perdagangan bebas). Hubungan ASEAN-China dalam kerangka FTA bertujuan untuk: *pertama*, memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi kedua pihak; *kedua*, meliberalisasikan perdagangan barang, jasa dan investasi; *ketiga*, mencari area baru dan mengembangkan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan kedua pihak; dan terakhir, memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dengan negara anggota baru ASEAN dan menjembatani gap yang ada di kedua belah pihak. Bagi ASEAN hubungan kerjasamanya dengan China adalah sebagai upaya perluasan kerjasama, mempererat hubungan kenegaraan dan memperkuat perekonomian ASEAN dalam mengupayakan peluang bisnis dengan China. Sedangkan bagi China dengan melakukan perluasan kerjasama, maka China dapat berperan sebagai partner dalam kerjasama ekonomi politik bagi ASEAN.¹⁰

Disamping itu, hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Cina memiliki dasar kemitraan strategis yaitu dengan dilatar belakangi oleh adanya kepentingan antar kedua negara. Cina merupakan negara Asia yang memiliki pengaruh besar dalam arus pasar global baik dari segi politik maupun ekonomi sehingga Indonesia mengharapkan perbesaran volume perdagangan dan peningkatan kapasitas perekonomian melalui hubungan kerjasama

Hubungan Kerja dengan Cina yang membuka akses pasar lebih besar

terlebih lagi Indonesia bagi Cina adalah mitra strategis yang dapat diperhitungkan mengingat menjadi salah satu negara Asia yang mampu bertahan ditengah krisis global.

Secara umum dapat dikatakan bahwa baik bagi Indonesia, Jepang dan China kerjasama ekonomi dan perdagangan bebas dalam kerangka EPA dan FTA dianggap penting, selain karena memiliki hubungan interdependensi satu sama lain, kerjasama tersebut juga dianggap sebagai terobosan dari forum kerjasama FTA multilateral WTO yang cenderung lamban atau berbelit-belit sehingga pilihan kerjasama ekonomi dalam forum bilateral lebih rasional dalam hal meningkatkan volume perdagangan ke dua negara. Selain itu, bagi Indonesia sendiri hubungan kerjasama ekonomi dan perdagangan bebas dengan Jepang (EPA) dan China (FTA), diyakini dapat memberikan manfaat yang lebih baik bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia, meski tidak sedikit tantangan sebagai konsekuensi dari kesepakatan tersebut.

C. Fokus Permasalahan

Fenomena kemitraan ekonomi dan perjanjian perdagangan bebas hadir sebagai permasalahan yang menjadi perhatian memasuki abad ke-21 ini. Berbagai bentuk implikasi dan dampak yang perlahan dirasakan sebagai akumulasi makin terasa di beberapa negara, terutama Indonesia yang begitu agresif dalam merespon berbagai forum ekonomi bilateral, regional, dan

namun berbagai aspek termasuk dampak ekonomi juga menjadi akibat dari perjanjian kemitraan ekonomi dan perdagangan bebas. Belakangan ini, Indonesia telah banyak mengikuti kemitraan ekonomi dan perjanjian perdagangan bebas baik dalam kerangka bilateral, regional, maupun multilateral. Dan diketahui posisi Indonesia cukup lemah, khususnya dalam kemitraan ekonomi dan perjanjian perdagangan bebas dengan Jepang (EPA) dan China (FTA).

Berdasarkan uraian di atas, dan dari beberapa konsep kunci (perjanjian kemitraan ekonomi dan perdagangan bebas/internasional, forum atau organisasi/lembaga ekonomi-politik internasional, politik luar negeri, kepentingan nasional, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, dan strategi) pada latar belakang masalah, penulis ingin menjawab secara serius topik ini. Untuk menguraikan dan memberikan arahan yang terperinci dalam tulisan ini, maka permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut :

Bagaimana Strategi Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Jepang dan China dalam Isu Perdagangan Bebas?

D. Kerangka Pemikiran

Untuk membantu dan memahami tulisan ini, sehingga tabir gelap yang ada pada rumusan permasalahan bisa terjawab dan terungkap, maka penulis menggunakan konsep strategi dan kepentingan nasional untuk mengetahui

terutama dalam forum kemitraan ekonomi dan perdagangan bebas EPA dan FTA, SWOT analisa untuk mengidentifikasi berbagai faktor internal dan eksternal secara sistematis dalam merumuskan berbagai strategi, dan Teori Pembuatan Kebijakan Luar Negeri dari William D. Coplin untuk mengoptimalkan peluang dari politik luar negeri Indonesia dalam forum kerjasama EPA dan FTA dengan Jepang dan China. Untuk itu penulis merasa perlu menjelaskan sekilas tentang pengertian dari konsep-konsep dan teori tersebut serta korelasinya terhadap fokus permasalahan yang sedang diteliti.

1. Strategi¹¹

Strategi adalah rencana jangka panjang dengan diikuti tindakan-tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu, yang umumnya adalah kemenangan. Pada awalnya istilah ini dipergunakan untuk kepentingan militer saja, tetapi kemudian berkembang ke berbagai bidang (politik, ekonomi, hukum, dsb) yang berbeda seperti strategi partai politik, strategi ekonomi dan bisnis dan strategi perumusan pembuatan Undang-undang serta berbagai peraturan pemerintah lainnya (heterogenitas Indonesia). Dalam disiplin Ilmu Hubungan Internasional kontemporer istilah strategi terus berkembang. Menurut Argyris (1985), Mintzberg (1979), Steiner dan Miner (1977) strategi merupakan respon secara terus menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang terdapat dalam organisasi.

¹¹Zainuri,. Skripsi, *Strategi Indonesia Menangkap Peluang dari Economic Partnership Agreement*

Sedangkan menurut Arnold Stinberg, strategi adalah rencana untuk tindakan. Penyusunan dan pelaksanaan strategi mempengaruhi sukses gagal pada akhirnya. Robert A. Isaak memberikan pengertian bahwa stretegi adalah cetak biru kognitif pribadi atau organisasional atau rencana-rencana yang dibuat untuk masa yang akan datang.

Dari definisi tersebut di atas, dapat penulis simpulkan bahwa strategi adalah seluruh ide kognitif elite pemerintahan atau masyarakat luas atau warga negara (lebih dari sekedar alat) yang diterjemahkan kedalam berbagai kebijakan politis oleh negara bangsa (melalui perwakilan resmi) untuk mempertahankan kepentingan tertentu dan di dalam keadaan tertentu (alternatif-alternatif) yang dirumuskan secara sistematis atau berkala (jangka pendek, menengah dan panjang) guna memperoleh hasil tertentu yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam konteks strategi Indonesia untuk memperlebar volume perdagangan dan meningkatkan kapasitas perekonomian nasional atau mengejar kepentingan nasional lainnya, dapat dilihat dari keterbukaan dan agresifitas Indonesia terhadap forum-forum kerjasama dan perdagangan

2. Kepentingan Nasional

Konsep kepentingan nasional menurut kamus politik internasional adalah kebutuhan dan keinginan-keinginan yang dirasakan oleh suatu negara yang berdaulat dalam berhubungan dengan negara berdaulat lainnya yang merupakan lingkungan eksternalnya. (Krisdi, Didi, Kamus Politik Internasional, Gramedia Widiasrana Indonesia, Jakarta 1993). Sedangkan menurut Jack C Plano dan Roy Olton, Kepentingan Nasional adalah :

"The fundamental objective and ultimate determinant that guides the decision makers of state in making foreign policy. The national interest of state is typically a highly generalized conception of those element that constitute the state smart vital needs".¹²

Kepentingan nasional merupakan konsep yang populer untuk mendeskripsikan, menjelaskan, meramalkan, maupun menganjurkan perilaku inter-nasional. Dengan demikian kepentingan nasional merupakan kunci untuk memahami perilaku politik luar negeri suatu negara, di mana negara-negara selalu bertindak untuk tujuan kepentingan nasional. Morgenthau mengatakan bahwa perilaku negara dalam hubungan internasional dituntut oleh pengejaran kepentingan nasional, kepentingan

nasional itu adalah memperoleh, memepertahankan atau memperbesar kekuatan negara.¹³

Kepentingan nasional (*national interest*) adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan negara-negara atau sehubungan dengan hal-hal yang dicita-citakan. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum yang menjadi kebutuhan vital bagi negara. Unsur tersebut antara lain kesejahteraan ekonomi.¹⁴

Politik luar negeri suatu negara tidak bisa dilepaskan begitu saja dari kepentingan nasional bangsa tersebut, karena kepentingan nasional merupakan salah satu terbentuknya suatu kebijakan politik luar negeri, di mana Indonesia dalam hal ini lebih menekankan pada kekuatan dalam negerinya untuk menguatkan unsur domestik khususnya pada ekonomi dan perdagangan, terlebih melalui visi dari masing-masing kementerian terkait. Hal demikian dapat diukur dari harapan Indonesia untuk memperbesar volume perdagangan dan meningkatkan kapasitas perekonomian melalui kesepakatan IJEPA dan ACFTA yang mungkin menawarkan berbagai peluang lain bagi Indonesia.

3. Analisis SWOT

Analisi SWOT disebut analisis situasi yang paling populer. Analisis SWOT merupakan identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan sebuah strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang

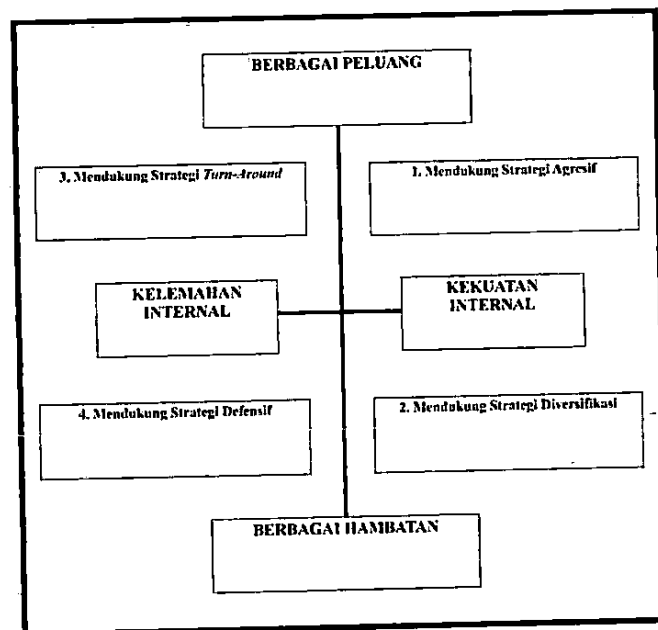
¹³ Masoed, Mohtar, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, Pusat Antar Universitas – Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1989. Hlm. 146.

¹⁴ *Op Cit.*, *Kamus Hubungan*, Hlm. 5.

dapat memaksimalkan kekuatan (*Strenghts*) dan peluang (*Opportunities*) namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weakness*) dan ancaman (*Threats*).

SWOT adalah singkatan dari lingkungan Internal *Strenghts* dan *Weakness* serta lingkungan eksternal *Opportunities* dan *Threats* yang dihadapi dunia ekonomi. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal Peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*) dengan faktor internal Kekuatan (*Strenghts*) dan Kelemahan (*Weekness*). Ilustrasi di bawah ini akan memperjelaskan gambaran tentang Analisis SWOT.¹⁵

Tabel. 1. Analisis SWOT



Sumber: Freddy Rangkuti,. Analisa SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2006. Hlm. 18-20.

¹⁵Op Cit,.Menangkap Peluang,. Hlm. 8-10.

Kuadran 1 : Ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan.

Perusahaan atau organisasi (Indonesia) memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif.

Kuadran 2 : Meskipun menghadapi berbagai ancaman, perusahaan atau organisasi tersebut masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diverifikasi.

Kuadran 3 : Perusahaan atau organisasi menghadapi peluang yang sangat besar, tetapi di lain pihak, ia menghadapi beberapa kendala yaitu kelemahan internal. Fokus strategi perusahaan atau organisasi ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal sehingga dapat merebut peluang dengan baik.

Kuadran 4 : Ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, perusahaan atau organisasi tersebut menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal.

Kesepakatan kemitraan ekonomi dan perdagangan bebas antara Indonesia dengan Jepang (EPA, berlaku 1 Juli 2008) dan dengan China (FTA, berlaku 1 Januari 2010) yang menimbulkan pro dan kontra itu telah

memasuki usianya yang ke-lima dan ke-tiga. Sejalan dengan prosesnya, ternyata kedua forum kemitraan tersebut telah membuktikan masing-masing argumen dasar dari kelompok-kelompok pendukung dan penentang kerjasama ekonomi dan perdagangan bebas. Indonesia telah mengalami surplus pada fase awal kesepakatan, dan juga defisit pada beberapa tahun terakhir.

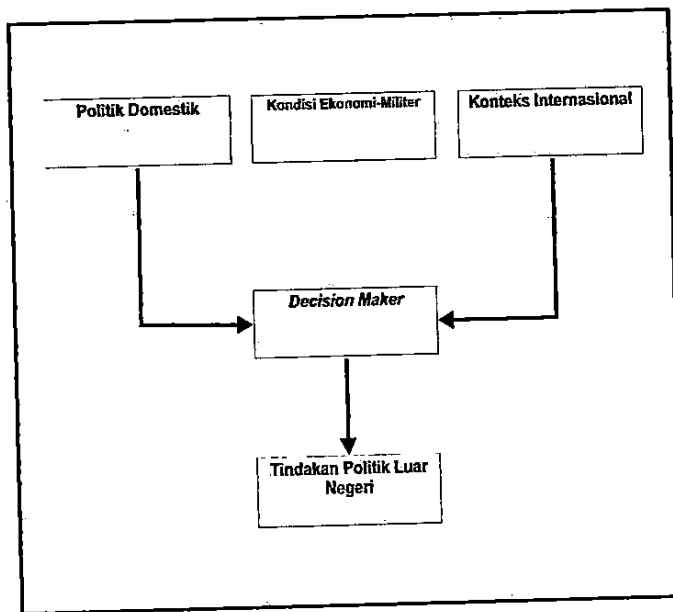
Untuk dapat merebut peluang dari Jepang dan China melalui forum kerjasama EPA dan FTA, analisis SWOT dapat membantu Indonesia dalam memperbaiki kelemahan serta meningkatkan kekuatan untuk bersaing dalam kemitraan ekonomi dan perdagangan bebas antar mitra. Oleh karena itu, Indonesia perlu berhati-hati dalam menyetujui berbagai perjanjian internasional terutama dengan negara maju.

4. Teori Pembuatan Kebijakan Luar Negeri

Salah satu teori pengambilan keputusan dan kebijakan politik luar negeri dikembangkan oleh William D. Coplin, dengan argumen bahwa tindakan politik luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh empat determinan. *Pertama*, kondisi politik luar negeri, *Kedua* situasi ekonomi dan militer tersebut termasuk faktor geografis yang selalu menjadi pertimbangan utama dalam pertahanan keamanan, *Ketiga*, konteks internasional dan *Keempat* kontak pengambilan keputusan

Ilustrasi di bawah ini akan memperjelaskan gambaran tentang pembuatan keputusan luar negeri suatu negara.¹⁶

Tabel. 2. Proses Pembuatan Kebijakan Luar Negeri



Sebagaimana skema kebijakan atau keputusan politik luar negeri D. Colpin di atas, dalam konteks kebijakan politik luar negeri Indonesia dapat dijelaskan secara sederhana bahwa di dalam menentukan sikap terhadap suatu hubungan yang berlangsung secara interdependensi, sebagaimana kerjasama ekonomi dan perdagangan bebas Indonesia EPA dan FTA dengan Jepang dan dengan China sangat dipengaruhi oleh faktor internal (politik domestik) dan eksternal (konteks internasional), yang meliputi kondisi ekonomi-militer. Adapun, faktor internal dalam konteks Indonesia adalah, Indonesia

¹⁶Skripsi, Syahputra, Fazrin, *Tantangan, Hambatan dan Peluang Indonesia Dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*, (UMY : 2009),. Hlm. 7.

mengharapkan perbesaran volume perdagangan dan peningkatan kapasitas perekonomian nasional melalui dua forum kerjasama tersebut, selain ingin menunjukkan eksistensi atau posisi Indonesia yang bisa diperhitungkan di dunia internasional melalui keaktifannya diberbagai forum ekonomi dan politik internasional baik dalam skope bilateral, regional, maupun multilateral dengan mencerminkan transformasi demokratis disetiap kebijakan luar negerinya.¹⁷

Sedangkan yang dimaksud dengan faktor eksternal dalam konteks politik luar negeri Indonesia adalah, gencarnya integrasi ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara industri maju dan kaya (Jepang dan China) melalui politik luar negeri mereka, yang cenderung memilih kerjasama dalam bentuk kerjasama ekonomi dan perdagangan pada skope bilateral dan regional daripada dalam kerangka multilateral (dikarenakan mekanisme dagang yang rumit dan terbatas). Akhirnya mereka (Jepang dan China) lebih memilih forum bilateral untuk memperoleh keuntungan spesifik dari mitra strategis mereka, seperti Indonesia yang memiliki SDA yang melimpah dan SDM yang murah.

Selanjutnya berbagai faktor internal maupun eksternal tersebut, direspon oleh pejabat atau elite pemerintahan terkait (dari negosiasi sampai ratifikasi/eksekusi) yang berkolaborasi secara efektif untuk merumuskan strategi dan memutuskan suatu tindakan atau kebijakan politik luar negeri Indonesia secara tepat guna. Dalam hal ini, politik luar negeri Indonesia

menyetujui dua forum kerjasama ekonomi dan perdagangan bebas yang di kenal dengan istilah *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) dan *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA) beserta setiap program pelaksanaan dan peraturannya.

D. Hipotesa

Dari permasalahan yang diajukan pada fokus masalah tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa, **Strategi Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Jepang dan China Adalah Dengan Membentuk Forum Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan Bebas IJEPA dan ACFTA yang dilaksanakan melalui dua jalan strategi lain, yakni strategi ke dalam dan strategi keluar.**

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu bentuk pencapaian yang hendak diperoleh dalam suatu penulisan ilmiah. Diharapkan dengan tujuan yang hendak dicapai tersebut, maka arah penulisan skripsi ini akan semakin difokuskan dan terpusat pada suatu pembahasan yang optimal. Sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan, maka secara khusus penelitian ini bertujuan untuk :*Pertama*, menjawab rumusan masalah yang ada dengan bukti data dan fakta serta membuktikan hipotesa dengan teori yang relevan. *Kedua*,

perdagangan bebas yang semakin meluas dan mengglobal terutama dalam kesepakatan IJEPA dan ACFTA. *Ketiga*, untuk mengkaji politik luar negeri Indonesia dalam meningkatkan volume perdagangan dan kapasitas perekonomian melalui forum kerjasama IJEPA dan ACFTA. *Keempat*, untuk mengetahui hasil dari identifikasi prospek (kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, dan strategi) dari hubungan kerjasama yang sedang diperbandingkan.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dalam tataran teoritis maupun dalam tataran praktis. Penelitian ini akan bermanfaat bukan saja bagi perkembangan ilmu Hubungan Internasional (*basic reasearch*), tetapi juga dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan akademisi dan praktisi (*applied reasearch*) dibidang perdagangan internasional di negara ini. Semoga.

F. Metode Penelitian

- a. Jenis penelitian : Ada dua jenis penelitian, pertama jenis penelitian yang menggambarkan sesuatu, maka jenis penelitiannya adalah deskriptif, kedua jenis penelitian yang menjelaskan sesuatu, jenis penelitiannya adalah eksplanatif. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis deskriptif. Karena tujuan penelitiannya menggambarkan sesuatu. Oleh karena itu penulis memilih untuk menggunakan metode deskriptif ini untuk menganalisis permasalahan tentang kerjasama

ekonomi dan perdagangan bebas Indonesia dengan Jepang (IJEPA), dan dengan China (ACFTA).

- b. Teknik pengumpulan data : Pembahasan kajian ini merupakan kajian dengan teknik analisa data sekunder (deskriptif-kualitatif), yaitu seluruh data yang terkumpul akan diolah secara kualitatif, dan dengan menggunakan metode deduktif data sekunder. Dalam analisis, data-data diperoleh melalui pengumpulan dokumen, yaitu : meliputi buku-buku ilmiah dan hasil penelitian (skripsi, tesis, dan disertasi), Jurnal dan karya ilmiah lainnya, artikel, makalah-makalah, surat kabar serta berbagai berita baik cetak maupun elektronik.

G. Jangkauan Penelitian

Untuk memudahkan penulisan, penulis akan membatasi ruang lingkup kajian agar penulis tidak menyimpang dari tema atau tujuan yang diinginkan. Penulis akan membatasi kajian pada perkembangan (konvensional-modern) dari kerjasama perdagangan bebas terutama dalam forum kerjasama IJEPA dan ACFTA dalam rentan waktu sebelum pemberlakuan IJEPA dan ACFTA yang dibatasi dari tahun 2000 hingga pelaksanaan IJEPA secara penuh 1 Juli 2008 dan ACFTA 1 Januari 2010. Namun tidak menutup kemungkinan bila data yang digunakan adalah data dalam rentan waktu sebelum ataupun sesudah pemberlakuan kedua forum kerjasama tersebut, selama data yang

pembahasan lebih diarahkan kepada strategi yang dilakukan Indonesia dalam mencapai kepentingan nasional.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan usulan proposal penelitian skripsi ini terbagi ke dalam V (lima) Bab, masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab sesuai pembahasan dan materi yang hendak diteliti.

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini penulis menguraikan alasan ketertarikan penulis pada topik ini, latar belakang permasalahan yang melandasi penulisan ini. Dari latar belakang masalah tersebut dapat diidentifikasi beberapa masalah, dan dirumuskan dalam perumusan masalah yang dibahas dan dikaji serta dianalisis dalam penelitian. Penulis juga menuliskan tujuan penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang diajukan, dan manfaat penelitian baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Untuk membantu penulis dalam menganalisis jawaban dari permasalahan yang diajukan, penulis menguraikan kerangka konsep-konsep dan teori, serta dijelaskan asumsi-asumsi untuk mendeskripsikan jawaban sementara dari permasalahan yang akan dikaji dan dianalisis dalam penelitian ini. Selanjutnya untuk memudahkan penelitian, penulis menjelaskan metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, penulis juga membahas penulisan ini dalam lingkup penelitian dan yang

terakhir penulis menguraikan sistematika penulisan sebagai gambaran dari seluruh isi penulisan dalam penelitian ini.

BAB II : ANALISIS SWOT EPA DAN FTA DENGAN JEPANG DAN CHINA

Bab ini membahas tentang, posisi dan potensi dari Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantang Indonesia dalam kesepakatan IJEPA dan ACFTA, termasuk matriks SWOT EPA dan FTA.

BAB III : RESPON INDONESIA TERHADAP PELAKSANAAN PERDAGANGAN BEBAS : IJEPA DAN ACFTA

Bab ini terdiri dari tiga sub bab. *Pertama*, membahas tentang Dinamika Perdagangan Bebas Dalam Dimensi Global : Sejarah Perdagangan Bebas, Pro-Kontra Terhadap Perdagangan Bebas, dan Arah Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia dalam Sistem Perdagangan Bebas. *Kedua*, Kerjasama Indonesia-Jepang Dalam Forum IJEPA : Latar Belakang dan Prinsip Dasar IJEPA, Sektor-sektor dalam Kerjasama IJEPA, dan Menyoal Kepentingan Indonesia. *Ketiga*, Keikutsertaan Indonesia dalam forum ACFTA : Latar Belakang dan Prinsip Dasar Kerjasama ACFTA, Sektor-sektor dalam Kerjasama ACFTA, dan Menyoal Kepentingan Indonesia. *Keempat*, Kedigdayaan Negara Maju Dalam Mengembangkan Negara Berkembang Melalui Perdagangan Bebas : Hubungan

FTA dengan GATT-WTO dalam Perdagangan Global, Kepentingan Jepang dalam IJEPA, Kepentingan China dalam ACFTA.

BAB IV : PERBANDINGAN STRATEGI POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP PERDAGANGAN BEBAS DENGAN IJEPA DAN ACFTA

Bab ini membahas tentang, Skema Perbandingan Strategi Dalam Matriks SWOT, Strategi Indonesia Dalam Kerjasama IJEPA, Strategi Indonesia dalam Forum ACFTA.

BAB V : KESIMPULAN

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan inti dari bab dan sub-bab sebelumnya sekaligus sebagai penutup dari penyusunan skripsi ini. Selain itu merupakan penegasan kembali atas jawaban dari pertanyaan pada fokus